

## ABSTRAK

Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan ini bergantung terhadap Tenaga Kerja karena Tenaga Kerja memegang peranan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan tersebut. Pengertian perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan. Selaras dengan hal itu, Harjono berpendapat bahwa Para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pekerja perempuan dalam bidang kesehatan di PT. APAC INTI CORPORA Kabupaten Semarang, Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu social. Penelitian ini meneliti tentang kesesuaian putusan perundang-undangan yang berlaku tersebut dalam kehidupan sosial di masyarakat secara empirik. Orientasi pengkajiannya menitik beratkan pada aspek perlakuan norma-norma yakni perlindungan hukum pekerja perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT. Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu yang terdapat dalam Pasal 81 mengenai hak cuti haid, Pasal 82 mengenai hak cuti hamil dan keguguran, Pasal 83 mengenai kesempatan untuk menyusui. Namun terjadi hambatan di perusahaan dalam mengimplemntasikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut karena tidak semua pekeja perempuan mengerti dan memahami aturan-aturan yang berlaku di perusahaan serta masih kurangnya pengetahuan pekerja perempuan tentang pendidikan kesehatan. PT.Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang juga mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sekaligus memberikan solusi terhadap masalah yang dialami pekerja perempuan yaitu dengan bekerjasama dengan serikat pekerja untuk memberikan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk media baca atau majalah yang dikeluarkan oleh serikat pekerja. Pendidikan ini bertujuan agar para pekerja/buruh memperoleh pemahaman tentang kesehatan kerja agar aktifitas kerja tidak terganggu karena masalah kesehatan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja Perempuan**

## ABSTRACT

In essence, national development is the whole development of Indonesian people and the development of the entire Indonesian community. This development relies on Labor because Workers play an important role as actors and goals of development. The definition of protection is as a place of refuge, protection, help and guarding. In line with this, Harjono argues that legal reviewers have not comprehensively developed the concept of "legal protection" from a legal scientific perspective. The purpose of labor protection is to ensure a system of working relationships in harmony without the presence of strong pressure from weak parties. For this reason, employers must implement the labor protection provisions in accordance with the prevailing laws and regulations.

The formulation of the problem is how to implement the legal protection of women workers at PT. APAC INTI CORPORA Semarang Regency, How are obstacles and solutions in implementing legal protection for the rights of women workers. The research method in this thesis uses sociological juridical methods. It is said to be sociological juridical because it follows the pattern of social science research. This study examines the suitability of the prevailing legislative decisions in social life in society empirically. The study orientation focuses on aspects of the treatment of norms, namely the legal protection of women workers.

The results showed that in general PT. Apac Inti Corpora Semarang Regency had provided legal protection for the rights of women workers in the company's Collective Labor Agreement (CLA) based on Law No. 13 of 2003 concerning manpower which is contained in Article 81 concerning menstruation leave rights, Article 82 concerning the rights of maternity leave and miscarriage, Article 83 concerning the opportunity to breastfeed. But there were obstacles in the company in implementing the Collective Labor Agreement (CLA) because not all women workers understood and understood the rules that apply in the company and the lack of knowledge of women workers about health education. PT. Apac Inti Corpora of Semarang Regency also strives to overcome these obstacles while at the same time providing a solution to the problems experienced by women workers by cooperating with trade unions to provide health education through counseling in the form of reading media or magazines issued by trade unions. This education aims to get workers / laborers to gain an understanding of occupational health so that work activities are not disturbed due to health problems.

**Keywords:** Legal Protection, Women's Workers' Rights